

## **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara**

**Puspa Irajayanti Siregar**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

puspairajayantisrg@gmail.com

### **Abstrak**

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dengan pertumbuhan sampah yang semakin meningkat. Ada beberapa Dampak yang ditimbulkan sampah seperti menurunkan estetika lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Volume peningkatan sampah biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari kemajuan teknologi terutama dalam sistem pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih serba cepat dan praktis. Sampah merupakan suatu masalah besar yang perlu mendapat penanganan yang lebih karena dampak yang ditimbulkan sangat besar sehingga pengelolaannya sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Implementasi yang dimaksud merupakan kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimaksud adalah penyediaan/pembuatan TPS/TPA, sarana dan prasarana TPA/TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara sudah terlaksana hal ini terlihat dari terlaksananya program – program yang masih sedang berjalan. Meskipun dalam pelaksanaannya belum efisien. Hal ini disebabkan susahnya mencari lahan untuk TPS/TPA dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman peduli lingkungan.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pengelolaan Sampah*

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian sampah menurut Undang –Undang nomor 18 tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang padat. Sampah konsekuensi kehidupan, yang seringkali menimbulkan permasalahan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya, maka timbulan sampah tentunya juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan jumlah atau volume timbulan sampah. Sedangkan bertambahnya jenis aktivitas berarti semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan. Jumlah atau volume dan jenis sampah yang dibiarkan menumpuk sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Tumpukan sampah selain tidak sedap dipandang mata, juga membutuhkan lahan yang tidak sedikit pembuangannya serta dapat menimbulkan penyakit bagi manusia dan pencemaran lingkungan.

Ada beberapa Dampak yang ditimbulkan sampah seperti menurunkan estetika lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Volume peningkatan sampah biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari kemajuan teknologi terutama dalam sistem pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih serba cepat dan praktis. Sampah merupakan suatu masalah besar yang perlu mendapat penanganan yang lebih karena dampak yang ditimbulkan sangat besar sehingga pengelolannya sangat perlu dilakukan. Dengan demikian pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas kebersamaan, kepastian hukum, dan kewenangan pemerintah serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pengolahan sampah merupakan salah satu masalah besar yang selalu dihadapi di daerah perkotaan, terutama pada daerah yang padat jumlah penduduknya. Setiap pemerintah kota tentunya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang memiliki manajemen sampah yang baik (Yunita, Simorangkir dan Saputra, 2020). Tidak dapat dipungkiri sampah sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak teratur. Selain itu sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Polusi akibat sampah pun tidak dapat dihindari seperti polusi udara akibat pembakaran sampah, pencemaran air tanah dan permukaan, merusak keindahan pemandangan kota, dan menimbulkan aroma/bau yang tidak enak.

Untuk itu adanya tempat pembuangan sampah (TPS) sementara yang memadai akan meminimalisir dampak-dampak lingkungan tersebut. Tempat pembuangan sampah (TPS) sementara juga sangat penting jikalau ditempatkan pada lokasi yang sesuai untuk tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan tertentu dan berwawasan lingkungan. Dalam memilih lokasi tempat penampungan sampah (TPS) sementara sebaiknya meliputi evaluasi terhadap beberapa variabel berikut: jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap sungai, dan buffering di sekeliling tempat penampungan sampah (TPS). Adapun secara lebih spesifik syarat-syaratnya adalah: 8 - Minimal 30 meter dari sungai - Minimal berjarak 50 meter dari permukiman, sekolah, dan taman - Minimal berjarak 160 meter dari sumur .Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah kabupaten padang lawas utara terutama di kecamatan padang bolak

namun setiap upaya tersebut mengalami kendala, karena semakin tingginya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kabupaten padang lawas utara kecamatan padang bolak membuat kebutuhan tempat pembuangan akhir (TPA) sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah. Setiap bulannya produksi sampah semakin meningkat. Karena itu TPA sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah tersebut. Untuk saat ini sampah tersebut dibuang atau dikumpulkan ketempat pembuangan sementara (TPS) dengan status sewa lahan kepada masyarakat karena belum ada lahan yang pasti untuk TPS dan TPA yang sudah direncanakan dikarenakan kurangnya dana dan lahan yang sulit dicari. yang ada di daerah paranginan, gunungtua, kecamatan padang bolak. Namun melihat produksi sampah yang hampir setiap tahun bertambah, kapasitas TPS yang ada saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung sampah tersebut, selain pengadaan TPA yang begitu mendesak, penambahan alat transportasi pengangkut sampah dan tenaga kerja untuk tim kebersihan saat ini juga sangat dibutuhkan. Karena kurangnya alat transportasi dan tenaga kerja untuk tim kebersihan mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan.

Pada kabupaten padang lawas utara terutama kecamatan padang bolak, dinas yang berperan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah adalah dinas lingkungan hidup padang lawas utara. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 pasal 10 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. maka masyarakat sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggung jawab untuk menunjang upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara, menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk kemasan yang sudah digunakan. Daerah layanan kebersihan/ persampahan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 adalah :

1. Kelurahan Pasar Gunungtua kecamatan Padang Bolak
2. Pasar Purbabangun Desa Rondaman Dolok kecamatan Portibi
3. Pasar Siunggam Kecamatan Padang Bolak Tenggara.

Volume produksi sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 219.611,28 m<sup>3</sup>. Sedangkan Volume sampah yang ditangani sebesar 12.592,5 m<sup>3</sup>. Rendahnya volume sampah yang ditangani disebabkan belum semua daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mendapat pelayanan persampahan disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki daerah. Berdasarkan SNI T-13-1990-F, perkiraan dinas lingkungan hidup volume rata-rata timbulan sampah adalah 2,25 liter/jiwa/hari, maka diperoleh produksi sampah pada tahun 2019 sebesar 219.611,28 m<sup>3</sup>. Kemudian volume sampah yang ditangani dibandingkan dengan volume produksi sampah kabupaten, diperoleh penanganan sampah kabupaten pada tahun 2019 sebesar 5,73%. Sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

No	Sarana	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak

1.	Becak Motor	19	15	4
2.	Dump truck	2	2	-
3.	Armroll truck	5	1	4

Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten padang lawas utara harus lebih respon dan melakukan tindakan dalam pengelolaan sampah dengan menyediakan atau pembangunan TPA, memfasilitasi sarana dan prasarana, dan pengelolaan TPA serta memanfaatkan kembali sampah menjadi nilai ekonomis. Untuk itu yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara.**

## 2. METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikannya. Sugiyono (2017:15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksible, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Penelitian kualitatif berkenan dengan data yang bukan angka. Mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode kualitatif menggunakan interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Creswell dalam (Sugiyono 2017-40) penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### Kategorisasi Penelitian

Penyusunan kategorisasi merupakan tahapan penting dalam penelitian ini, kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek dalam penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti tentukan.

No	Kategorisasi	Indikator
----	--------------	-----------

1	Implementasi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya tindakan</li> <li>• Adanya keputusan</li> <li>• Adanya tujuan</li> </ul>
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan sampah</li> <li>• Penanganan sampah</li> </ul>

#### **Narasumber**

Dalam penelitian kualitatif. Narasumber merupakan kunci bagi peneliti dalam memberikan informasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara, yaitu:

#### **a. 2 (dua) orang pegawai pekerja Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara.**

1. Nama : Gerlinakani Harahap SP  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Usia : 33 Tahun  
 Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara
2. Nama : Hamdan Almuzahid, S.Hut, MM  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Usia : 35 Tahun  
 Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Padang Lawas Utara

#### **b. 4 (empat) orang pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara.**

1. Nama : Ansor Ramadan Harahap  
 Jenis Kelamin : laki- laki  
 Agama : Islam  
 Usia : 25 Tahun  
 Pekerjaan : Pengelolaan TPS/TPA Padang Lawas Utara
2. Nama : Syahrial Harahap  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam  
Usia : 30 Tahun  
Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara

3. Nama : Bibi Harahap  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 24 Tahun  
Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara

4. Nama : Iswandi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 32 Tahun  
Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA

**c. 4 (empat) orang petugas kebersihan Padang Lawas Utara**

1. Nama : Nelly Harahap  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Usia : 40 Tahun  
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

2. Nama : Kolom Harahap  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 51  
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

3. Nama : Samson Siregar  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Usia : 48  
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

4. Nama : Doli Harahap  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 26 Tahun  
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

**d. 4 (empat) orang masyarakat Padang Lawas Utara**

1. Nama : Jefri Tarigan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 27 Tahun  
Pekerjaan : Sekretaris desa GunungTua

2. Nama : Lastri Harahap  
Jenis Kelamin : Perempuan

- Agama : Islam  
Usia : 46 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : Derman Harahap  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 46 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama : Pita Hasibuan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Usia : 27 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan sebagai berikut :

- **Wawancara** adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai
- **Observasi** atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap
- **Informen penelitian** adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk menentukan informen peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling adalah, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti

##### **b. Data skunder**

Untuk memperoleh data sekunder, diperlukan cara dengan studi kepustakaan melalui membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis wacana, data, teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

#### **Teknik Analisis Data**

Bogden dalam (sugiono 2001:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- **Reduksi data**

Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

- **Penyajian data**

Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis

- **Penarikan kesimpulan**

Adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

#### **Waktu dan lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan pengumpulan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Padang Lawas Utara.

### **3. HASIL**

#### **Pembahasan**

Untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang tertulis dalam bab satu yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada hasil penelitian. Dari seluruh data dan informasi yang sudah didapatkan melalui studi dan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengelola TPS/TPA, Petugas Kebersihan, dan 4 (empat) warga Padang Lawas Utara. Data yang sudah diperoleh sudah disusun oleh penulis secara sistematis pada bagaian sebelumnya, baik melalui wawancara dilokasi penelitian dan juga data – data sekunder berupa berkas maupun catatan – catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang tindakan, keputusan dan tujuan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara, dalam melakukan analisis data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori teori yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat di sajikan dengan baik.

#### **1. Bagaimana Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.**

Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang – Undang implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang – Undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan – tujuan kebijakan atau program – program.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah. Bahwa program kerja sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari realisasi dari program kerja yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara yaitu adanya keputusan, tindakan untuk



mencapai suatu tujuan. Seperti pengadaan sarana pembuatan wadah sampah dalam mempermudah penanganan sampah, merelokasi TPA/TPS dan bank sampah guna untuk memberikan inovasi pengelolaan sampah yang lebih baik. Guna untuk melestarikan lingkungan agar tetap menjadi bersih, asri, sehat, dan nyaman dan juga mengurangi timbulan sampah yang dapat mengganggu kesehatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Varn Horn dalam buku Winarno (2008: 146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan – tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah**

Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara sangat berperan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang meliputi Penanganan dan pengurangan agar dapat mengurangi timbulan sampah. Adapun fungsi dan tanggung jawab Dinas Lingkungan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara yaitu menyediakan pembangunan TPS/TPA, menyediakan sarana dan prasarana TPS/TPA, menyediakan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat hingga ke TPS/TPA, menyediakan sarana dan prasarana untuk petugas kebersihan seperti memaksimalkan jumlah petugas, dan memenuhi wadah sampah atau tong sampah di beberapa titik yang belum ada tong sampah. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat cara membudidayakan membuang sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah hingga ketempat pembuangan sampah, dengan menggunakan box terpisah antara sampah organik dan nonorganik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suyono (2019:129) pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan pengendalian sampah mulai dari tempat penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampai dengan pembuangan akhir dengan menggunakan teknik sesuai dengan prinsip – prinsip kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan pengelolaan ini menyangkut administrasi, manajemen, aspek legal, teknologi tepat guna dan peran serta masyarakat.

## **3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Undang Undang nomor 81 tahun 2012 di Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara**

Dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan ada saja hambatan yang sering dialami Dinas Lingkungan Hidup seperti sulitnya mencari lahan untuk pembangunan TPS/TPA di Padang Lawas Utara. Lahan pembangunan TPS/dan TPA adalah salah satu yang menjadikan penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, kurangnya dana dan sulitnya mencari lahan menjadikan tujuan untuk mengelola sampah mengalami hambatan, dengan adanya hambatan ini Dinas Lingkungan Hidup selalu mengupayakan agar semua berjalan dengan baik.

Masyarakat juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara. Di karenakan setiap pemikiran dan pandangan masyarakat berbeda-beda, menjadikan sasaran

tujuan mengalami hambatan, namun bukan berarti pemikiran dan pemahaman mereka tersebut tidak dapat diubah.

Hal ini sesuai dengan faktor penghambat implementasi kebijakan publik Tangklisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu ;

- a). komunikasi yaitu persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang seharusnya dilakukan
- b). sumber daya yaitu sumber daya disini maksudnya adalah berupa sumber daya manusia atau meliputi staf – staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas – fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi menyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketepatan dari personil – personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksanaan dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain – lain.

#### 4. KESIMPULAN

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah maka sangat diperlukan model pengelolaan sampah yang baik dan tepat untuk dikembangkan agar kualitas lingkungan dan kesehatan dapat ditingkatkan serta sampah dapat menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Didalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik didefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik dimaksud untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Hingga saat ini pelayanan publik bidang pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena menyangkut aspek kesehatan dan aspek lingkungan hidup. Dengan adanya keputusan, tindakan dan tujuan adalah suatu bentuk kegiatan atau program yang dilakukan secara terorganisasi dengan secara bersama – sama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pada bagian ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil informasi dan data mengenai pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini guna menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah :

Operasi dalam melakukan pengangkutan sampah sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, seperti sumber daya manusia yang tidak maksimal dan kendaraan dalam proses pengangkutan yang kurang mengakibatkan pengangkutan tidak stabil. Perlu adanya pemahaman untuk penanganan dan pengurangan sampah sedini mungkin agar dapat mengurangi sampah dari sumbernya yaitu masyarakat. Karena pemahaman dalam pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan hidup masih kurang dalam hal tersebut. Maka perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi dalam melakukan pengelolaan sampah tersebut. Sarana dan prasarana yang tidak maksimal seperti kurangnya lahan dan dana untuk pembangunan TPA mengakibatkan adanya kesulitan dalam pengelolaan sampah. Kurangnya pendalaman beberapa aspek dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, seperti aspek biaya, operasional pengangkutan dan penentuan lokasi pengadaan prasarana sampah.

## REFERENCE

### Buku

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan Penelitian Evaluasi)*. Alfabeta : Bandung

Susyono. Budiman. 20019.

*Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan*. EGC

2010. Jakarta

Tangklisan, Hessel. Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, proses*

*dan Studi Komparatif*. Center of academic publishing service. Yogyakarta.

### Jurnal

Ama, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perpustakaan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).

Anshori, A. (2016). *Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak*.

Athoriq, M. I. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).

Daulay, M. R. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).

Husmayanti, R. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UMSU).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). *MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN*. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

- Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- Yunita, L., Simorangkir, W., & Saputra, S. (2020). Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Metode Keranjang Takakura Pada Ibu Rumah Tangga Kelurahan Glugur Darat I Kota Medan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 1(1), 32-39.
- ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN

PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KOTA MEDAN.